

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Berdasarkan struktur penerimaan suatu negara, dari seluruh sektor khususnya dijadikan bagian dari penerimaan terhadap negara Indonesia. Sehingga diketahui bagian dari sektor yang dimaksud mempunyai dominasi utama dari komponen yang tersedia dengan aspek yang mampu menjadi di sumber pokok dalam pemasukan suatu negara yang akan menjadi tolak ukur dalam melakukan pelaksanaan penggerak pemerintah serta penekanan terhadap pembangunan nasional. Dengan begitu kerjasama yang bersifat aktif sangat diharapkan dalam berbagai komponen publik untuk meringankan beban demi mewujudkan suatu pembangunan dalam suatu negara yang akan direalisasikan dari partisipasi bahu-membahu secara menyeluruh demi mewujudkan pembangunan nasional tersebut, kemudian memastikan bahwa masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang sebesar-besarnya.

Apabila dilihat dalam suatu Biro Pusat Statistik atau yang disingkat dengan (BPS) Menjelaskan bahwa sumber tersebut mampu memaparkan mengenai penerimaan dalam bentuk pajak bahkan kontribusi terbaik berasal darinya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dimasa tahun 2007 hingga berlangsung di tahun 2016. Pada dasarnya penerimaan terhadap pajak tersebut pada penerimaan pajak dalam negeri

kemudian pajak perdagangan internasional. Penerimaan pajak dalam negeri dianggap sebagai sumbangsih terbesar yang memberikan kontribusinya secara cara dominasi dan ini ditunjukkan pada tinjauan pertahun yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu namun tidak dapat dipungkiri bertepatan pada tahun 2009 terjadinya penurunan, namun usaha tersebut dengan sigap dapat diatasi dengan terus mempertahankan posisinya bahkan mampu mencapai peningkatan secara optimal. Tetapi perlu digarisbawahi ini dalam tahun terakhir berkaitan mengenai penerimaan pajak masih sulit untuk direalisasikan.

Berdasarkan pandangan dari Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani maka diketahui terdapat berbagai jenis penyebab yang menjadi latar belakang penurunan penerimaan negara bahkan jika diposisikan berada dalam urutan terbawah sehingga menunjukkan sulitnya merealisasikan target yang sudah ditentukan semula dalam hal ini dapat dilihat dari bagian pertama, terjadinya perlambatan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional yang sedang di upayakan, kemudian selanjutnya penentuan dari berbagai jenis harga pokok yang dikhususkan pada jenis barang-barang ekspor pada hakikatnya belum secara menyeluruh untuk melakukan suatu evaluasi ataupun perbaikan yang tentunya membawa dampak atau pengaruh terhadap penerimaan negara melalui bidang yang dimaksud juga akan mengalami penurunan, sementara yang ketiga yaitu dalam ruang lingkup ekonomi skala global yang sulit untuk diatasi atau menemukan solusi yang tepat dengan begitu berdampak terhadap perdagangan internasional yang

juga mengalami penurunan. Sementara yang menjadi faktor lainnya yaitu berasal dari ruang lingkup perdagangan internasional itu sendiri yang tergolong ke dalam kategori relatif rendah.

Penerimaan negara dapat diinterpretasikan dengan berbagai hal salah satunya yaitu dengan pajak yang mempunyai dominasi utama dengan perannya yang begitu penting untuk melakukan pembangunan skala nasional dan mempunyai peran demi memastikan masyarakat mendapatkan kesejahteraan ataupun keadilan. Dengan begitu dibutuhkannya suatu pergerakan maupun strategi tertentu yang berfungsi agar pajak dapat dipungut secara teratur dan tepat kemudian mampu mewujudkan hal-hal yang dijadikan sebagai sasaran utama untuk ditentukan dalam pelaksanaannya dari pemerintah.

Pemerintah hendaknya dapat melaksanakan berbagai aturan yang sudah diselaraskan serta pemberlakuan yang ditetapkan dalam rangka menciptakan besarnya peran untuk mewujudkan atau memudahkan upaya dalam membawa Indonesia menuju pembangunan nasional yang diharapkan. Pajak dalam bentuk realisasinya sungguh tidak mudah untuk dipastikan berjalan secara baik-baik saja ketika belum munculnya kesadaran mendalam dari masyarakat tersebut sebab mereka mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pelunasan atau pembayaran terhadap pajak yang menjadi tanggungannya, hal ini dapat dilihat bahwa tak dapat dipungkiri beberapa diantara masyarakat masih enggan untuk membayar zakat atau berusaha untuk menghindarkan dirinya dalam melakukan pembayaran pajak

tersebut, padahal jika diketahui secara hakikatnya masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk melunasi pajak di mana masyarakat juga ikut merasakan seluruh manfaat dari berbagai prasarana umum yang tersedia demi menunjang kebutuhan masyarakat dan memastikan kehidupan masyarakat dapat berjalan sejahtera dan sebagaimana mestinya.

Dengan menyesuaikan terhadap UU No. 33 tahun 2004 yang berhubungan terhadap pemerintah daerah sudah diinterpretasikan dalam bentuk harapan dari aturan pemerintah daerah yang berlaku agar segala bentuk urusan dalam kinerja pemerintah telah diatur dan diurus sedemikian rupa dan ini akan menyesuaikan terhadap asas otonomi maupun tugas pembantuannya, agar masyarakat lebih cepat mampu merealisasikan kesejahteraan sesuai dengan harapannya. Otonomi daerah berdasarkan implementasinya tentunya mempunyai tujuan agar masing-masing daerah menjadi lebih mandiri kemudian adanya transparansi yang diperbaiki serta akuntabilitas publik yang dikemukakan terhadap penggunaan keuangan daerah dalam rangka mengelola keuangannya secara baik dan benar, menumbuhkan respon dari intervensi pemerintah pada rakyat sesuai dengan berbagai kebutuhan yang harus terpenuhi, kemudian adanya intervensi dari publik tersebut untuk mewujudkan suatu pembangunan dalam masing-masing daerah, menumbuhkan efisiensi serta efektivitas agar keuangan dan layanan publik dapat dikelola dengan baik serta mampu mewujudkan pemerintah yang bersifat demokratis (Mahmudi, 2009:2).

Pajak bumi bangunan merupakan bentuk pajak daerah apabila dibagi sesuai dengan klasifikasinya. Dalam melakukan pengelolaan terhadap PBB maka tujuan utamanya agar menetapkannya sebagai pajak daerah sebagaimana aturan yang berlaku dalam undang-undang pajak daerah maupun retribusi daerah karena akuntabilitas penyelenggaraan terhadap otonomi daerah dapat ditingkatkan, kemudian adanya hadapan terbaru yang diberikan pada daerah itu sendiri agar memberlakukan suatu pungutan dalam hal ini berhubungan terhadap jenis pajak daerah yang ditambah maupun retribusi daerah itu sendiri, besarnya otoritas yang diberikan terhadap ruang lingkup pajak maupun retribusi yang diupayakan dari dasar pajak daerah yang dapat diperluas, kemudian kekuasaan yang diberikan terhadap daerah untuk menentukan penggunaan dari tarif pajak daerah serta membuat fungsi pajak dapat diserahkan menjadi instrumen anggaran dan menciptakan Tata aturan dalam daerah tersebut.

Di Indonesia sendiri dasar hukum yang digunakan untuk diterapkan akan dilandaskan terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985, tanggal 27 Desember 1985. Sementara aturan dalam penyelenggaraannya sudah dikemukakan pada Peraturan Pemerintah No.46 dan 47 tahun 1945, kedua aspek tersebut bertepatan dalam tinjauan 27 Desember 1985, UU No. 12 tahun 1994 serta diberlakukan bermula dari 1 Januari 1995. Dengan menyesuaikan terhadap undang-undang yang berlaku ditetapkan dalam tinjauan 1 Januari 1986 masing-masing tanah maupun bangunan sudah ditetapkan pemungutan terhadap pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi bangunan dikenal menjadi objek dalam ruang lingkup pajak yang diinterpretasikan dengan tanah maupun bangunan dan dilandaskan terhadap besarnya manfaat atau kenikmatan yang diperoleh dalam pembayaran yang diperhitungkan dalam jangkauan pertahun. Pada dasarnya masing-masing aspek tersebut dijadikan sebagai objek melalui PBB baik itu dari bumi maupun bangunan arti dari bumi itu sendiri menjadi suatu permukaan bumi yang dapat diinterpretasikan dalam bentuk tanah serta perairan dan berbagai hal yang berada di bawah atau pengalirannya, sementara bangunan dalam wujud teknik yang sudah ditentukan akan terus mengalami pertumbuhan yang bersifat tetap baik itu pada tanah maupun perairan yang berada di wilayah negara Indonesia (Mokamat:2009).

Efektivitas yaitu tolak ukur yang mampu menyediakan pendeskripsian terhadap besarnya tingkatan sasaran maupun tujuan yang dapat direalisasikan. Orientasi dari efektivitas terhadap berbagai keluaran sementara persoalan mengenai masukan yang digunakan bersifat kurang yang ditetapkan sebagai orientasi pokok. Apabila adanya hubungan dari efisiensi terhadap efektivitas tentu akan menimbulkan suatu efektivitas tetapi tidak dapat dipastikan efisiensi mengalami peningkatan (Sedarmayanti, 2005:59).

Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai kota yang mempunyai kemajuan yang begitu dinamis dan pesat. Kabupaten Kepulauan Tanimbar merupakan kota dengan pengimplementasian pajak bumi dan bangunan ditentukan menjadi pajak daerah.

PBB yang ditetapkan pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah dilandaskan terhadap implementasi dari zona nilai tanah atau yang disebut dengan (ZNT) yang hampir mencapai penentuan dari harga pasar serta memiliki kemampuan dalam menghasilkan pembangunan yang merata pada masing-masing Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Penerimaan terhadap pajak bumi dan bangunan sebagai bentuk aspek yang berasal melalui tulang punggung pengelolaan daerah tersebut. Dengan demikian adanya potensi dari masing-masing daerah dalam memungut PBB tentu membawa pengaruh terhadap pembangunan maupun pertumbuhan yang terjadi pada ruang lingkup wilayah yang dimaksud dan membawa dampak terhadap tingkatan kontribusi atau keterlibatan PBB yang diterima pada APBD, dengan begitu ketergantungan yang dihasilkan juga akan diperkecil pada pemerintah pusat.

Lokasi yang digunakan dalam penelitian yang dilangsungkan berikut pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Tempat yang dipilih oleh penulis tentunya mempunyai alasan terhadap pertumbuhan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan kecukupan terhadap tingkat kepadatannya apabila dilakukan perbandingan pada kabupaten yang lain, hal ini dapat dipaparkan melalui kemunculan dari pembangunan yang dapat menginterpretasikan investasi masuk yang tersedia pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Berdasarkan apa yang telah disampaikan di atas Adanya ketertarikan dari penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “ **Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan**

**(PBB) dan Retribusi Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar”.**

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat pertumbuhan PBB di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 2018 sampai tahun 2020?
2. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan PBB pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2018 sampai tahun 2020?
3. Bagaimana kontribusi penerimaan PBB terhadap APBD Kabupaten Kepulauan Tanimbar?
4. Apa faktor penghambat efektivitas penerimaan PBB?
5. Seberapa besarkah tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ?
6. Seberapa besarkah tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar ?

**C. Ruang Lingkup Penelitian**

Perhatikan penulisan terhadap laporan akhir berikut untuk membuatnya memiliki pembatasan sehingga tidak menjerumus pada penyimpangan permasalahan yang tersedia pada akhirnya penulis menentukan batasan dalam lingkup pembahasan yang sesuai dengan judul penelitian tentang pengaruh dari besarnya efektifitas yang dihasilkan dalam

pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan retribusi daerah atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang berada pada Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan variabel yang diteliti yaitu pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagai ( $X_1$ ), Retribusi Daerah ( $X_2$ ), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y).

#### **D. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan penerimaan PBB dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat efektivitas penerimaan PBB pada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020.
2. Untuk mempelajari, menganalisa, dan menyimpulkan tentang kontribusi penerimaan PBB terhadap APBD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat efektivitas penerimaan PBB.
4. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Penelitian, ialah untuk menerapkan serta melakukan pengembangan terhadap ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh penulis selama menempuh pendidikan dalam bangku perkuliahan.
2. Akademik, untuk ditentukan menjadi rujukan tambahan informasi dalam suatu penelitian selanjutnya terkait dengan kesamaan permasalahan.
3. Pemerintah yang dapat dijadikan sebagai pedoman terhadap pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar kemudian menentukan suatu rumusan agar diterapkannya kebijakan tertentu yang berfungsi dalam memaksimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan dengan begitu harapan yang dikemukakan sebagai suatu dorongan dalam menumbuhkan kinerja yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh data yang utuh, penulis mengklasifikasikan bab tersebut ke dalam 5 bagian yang menjadi beberapa aspek dari bab yang dimaksud yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bagian pendahuluan merupakan uraian beserta penjelasan umum mengenai judul penelitian pengaruh efektivitas pendapatan dari pajak bumi dan bangunan yang dibahas penulis dalam pembagiannya meliputi beberapa cakupan mulai dari latar

belakang dalam penelitian, kemudian adanya rumusan terhadap permasalahan, kemudian ruang lingkungannya, tujuan dalam penelitian serta manfaat dalam penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II Uraian Teoritis**

Berdasarkan pembahasan pada bab berikut mengenai ekonomi makro, kebijakan stabilitas, adanya anggaran pendapatan dan belanja daerah, kemudian retribusi, efektivitas serta kontribusi pendapatan pajak bumi dan bangunan atas anggaran pendapatan serta belanja daerah, penelitian sebelumnya, bagian kerangka pemikiran dan juga hipotesis.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan lebih rinci tentang metodologi penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yang merupakan pembahasan yang disesuaikan secara sistematis dan terperinci yang meliputi definisi operasional, prosedur pengumpulan data, dan jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan inti dari penelitian yang sedang diteliti, sehingga pada bab ini dapat mendeskripsikan objek penelitian yang dapat dicantumkan sebagai sub-bab tersendiri yang kemudian diikuti dengan analisis dan pembahasan data. Inti dari bab ini didalamnya menguraikan tentang gambaran umum

Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang berhubungan dengan jumlah penduduk, perekonomian, gambaran umum badan pengelola pajak dan retribusi daerah, pengelolaan data, tingkat pertumbuhan penerimaan PBB, efektivitas penerimaan PBB, serta kontribusi PBB terhadap APBD di Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

## **BAB V PENUTUP**

Isi dari bab berikut terkait dengan kesimpulan yang menjelaskan mengenai perolehan dalam penelitian yang dilandaskan terhadap penganalisisan hasil serta penguraian data yang sudah dibahas dalam beberapa bab terdahulu.